## SKRIPSI

# PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IB Selong)

Diajukan Kepada Universitas Gunung Rinjani Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

ANDI BUDIMAN NIM: 19300829FH05

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI S E L O N G 2 0 1 0

# LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk diuji

Disetujui pada tanggal: 22 Oktober 2010

Pembimhing Urama

Muh. Saleh, SIP, MH. NIDN: 0831 27602 Pembimbing Pendamping

Tamrin, SH. NIDN: 0801076601

#### BAB V

#### PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim;
- Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah:
  - a. Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar;

b. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

- 1. Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Tidak sembrono dan sewenang-wenang. Harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama termasuk mengedepankan sanubari dan hati nuraninya. Jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan Keserampangan hakim dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa, dapat merugikan pembelaan terdakwa;
- 2. Hakim hendaknya bersikap hati-hati, cermat dan teliti dalam menanggapi pencabutan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa. Pemeriksaan yang seksama yang dilandasi atas hati nurani yang jernih, mutlak dibutuhkan. Kecerobohan dan kesewenang-wenangan hakim dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa, akan berdampak terhadap semua alat-alat bukti yang ada, sehingga dapat merugikan terdakwa.